

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DERAJAT
DESENTRALISASI FISKAL DI KABUPATEN GRESIK 1988 - 2008**

SKRIPSI



Oleh :

AHMAD FANANI

NPM 071101002

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “ VETERAN “
JAWA TIMUR
2011**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

“Ya Allah..... Yang Maha Hidup dan Maha Tegak di atas Dzat-Nya sendiri, dengan Rahmat-Mu ya Allah.... saya memohon baguskanlah diriku dan permudahkanlah segala urusanku dan janganlah Engkau serahkan urusanku pada diriku sendiri walau sekejap mata.”

Seuntai kalam Alhamdulillah dan sujud syukur saya persembahkan kepada Al-Kholik sangat Maha Bijak sebagai rasa syukur yang sangat dalam, atas karunia yang telah, sedang dan akan diberikan kepada hamba-Nya. Renungan hatiku mengisyaratkan bahwa titah pengabdian selama ini tiada bermakna tanpa bimbingan dan sinar illahi. Begitu juga dengan selesainya karya ini, di satu sisi nampak terukir rasa lega atas terwujudnya hasil jerih payah dari hasil perjalanan panjang study. Namun di sisi lain harapan untuk selalu dekat dengan Allah SWT akan senantiasa saya upayakan tetap menggema di setiap langkah-langkah irama kehidupanku selanjutnya dalam menghadapi goncangan dan cobaan hidup yang mungkin menghalang dan membentang di hadapan serta kehidupan yang luas ini.

Selama penulisan proposal ini, penulis telah mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Maka dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Bapak Drs. Ec. Marseto, DS, Msi, Selaku ketua jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Bapak Drs. Ec. Arief Bachtiar, Msi, Selaku Dosen Pembimbing.
5. Bapak dan Ibu Dosen pengajar di Fakultas Ekonomi.
6. Staf dan karyawan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

7. My Love family Papa dan mama tersayang, Serta kakak dan adik, terima kasih atas doanya, perhatian, dukungan serta kasih sayangnya selama ini sehingga dapat terselesaikannya proposal skripsi ini dengan lancar dan tepat waktu.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, yang telah membantu terselesaikannya proposal penelitian untuk syarat menyusun skripsi S-1 ini. Dalam penulisan proposal penelitian ini penulis dengan rendah hati mengharap saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak untuk kesempurnaan dalam proposal ini di masa datang.

Akhir kata, walaupun Tugas Akhir ini dibuat dengan segala keterbatasan dan masih banyak kekurangan yang penulis sadari, namun penulis berharap bahwa skripsi ini dapat diterima serta bermanfaat baik untuk penulis dan semua pihak yang membutuhkan.

Surabaya, Mei 2011

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
ABSTRAK	ix
 Bab I : PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
 Bab II : TINJAUAN PUSTAKA	 10
2.1 Hasil penelitian terdahulu.....	10
2.2 Landasan teori	14
2.2.1 Perencanaan Pembangunan	15
2.2.2 Pembiayaan Pembangunan Daerah Sebagai Unsur Penting Dalam Perencanaan	17
2.2.3 Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah	20
2.2.4 Derajat Desentralisasi Fiskal.....	21
2.2.5 Hubungan antara Perkembangan Ekonomi Daerah dengan Derajat Desentralisasi Fiskal.....	23
2.3 Kerangka Pemikiran	24
2.4 Hipotesis	28
 BAB III: METODE PENELITIAN	 29
3.1 Definisi Operasional Dan Variabel	29

3.2 Teknik Penentuan Sampel	31
3.3 Teknik Pengumpulan Data	31
3.4 Teknik Analisis Dan Uji Hipotesis.....	32
3.4.1 Teknik Analisis.....	32
3.4.2 Uji hipotesis.....	33
3.5 Uji penyimpangan Autokorelasi.....	37
3.6 Uji Penyimpangan Heteroskedastisitas	37
3.7 Uji Penyimpangan Multikolinearitas.....	38
 BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 39
4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian.....	39
4.1.1. Kondisi Geografis Kabupaten Gresik.....	39
4.1.2. Keadaan Kependudukan Kabupaten Gresik.....	42
4.1.3. Struktur Ekonomi	43
4.2. Deskripsi Hasil Penelitian	45
4.2.1. Derajat Desentralisasi Fiskal	45
4.2.2. Perkembangan Ekonomi Daerah	48
4.2.3. Sumbangan dan Bantuan (<i>Block Grants</i>)	49
4.2.4. Bagi Hasil Pajak Pemerintah Pusat	51
4.3. Analisis Model dan Pembuktian Hipotesis.....	52
4.3.1. Analisis Model.....	52
4.3.2. Pembuktian Hipotesis.....	59
4.4. Pembahasan	61
 BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	 63
5.1. Kesimpulan.....	63
5.2. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Distribusi Presentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Di Kabupaten Gresik Tahun 2005.....	44
Tabel 4.2. Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Gresik Tahun 1985-2005	46
Tabel 4.3. Perkembangan Ekonomi Daerah Kabupaten Gresik Tahun 1985-2005 .	48
Tabel 4.4. Sumbangan dan Bantuan yang bersifat <i>Block Grants</i> Kabupaten Gresik Tahun 1985-2005.....	49
Tabel 4.5. Bagi Hasil Pajak Pemerintah Pusat Kabupaten Gresik Tahun 1985-2005	51
Tabel 4.6. Hasil Perhitungan Regresi.....	53
Tabel 4.7. Tabel Titung dan Tatet	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Paradigma “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL DI KABUPATEN GRESIK”	27
Gambar 3.1	Kurva Distribusi T	35
Gambar 3.2	Kurva Distribusi F	36



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Tabel Data Skripsi
- Lampiran 2. Hasil Perhitungan Regresi
- Lampiran 3. Hasil Uji Non Heteroskedastisitas
- Lampiran 4. Hasil Uji Non Autokorelasi
- Lampiran 5. Hasil Uji Non Multikolinearitas
- Lampiran 6. Penyesuaian PAD
- Lampiran 7. Penyesuaian Data Total Pendapatan
- Lampiran 8. Penyesuaian Data Sumbangan dan Bantuan (*Block Grants*)
- Lampiran 9. Penyesuaian Data Bagi Hasil Pajak Pemerintah Pusat

ABSTRAKSI

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL DI KABUPATEN GRESIK 1988 - 2008

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel perkembangan ekonomi daerah, sumbangan dan bantuan yang bersifat *Block Grants* serta bagi hasil pajak pemerintah pusat terhadap derajat desentralisasi fiskal di Kabupaten Gresik 1988-2008. Variabel derajat desentralisasi fiskal dilihat dari kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah. Variabel perkembangan ekonomi daerah dilihat dari PDRB atas dasar harga konstan, variabel sumbangan dan bantuan yang bersifat *Block Grants* dilihat dari penerimaan sumbangan dan bantuan yang bersifat *Block Grants* serta variabel bagi hasil pajak pemerintah pusat dilihat dari penerimaan bagi hasil pajak pemerintah pusat.

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan metode kuadrat terkecil biasa atau *Ordinary Least Square* (OLS). Penggunaan model regresi linier klasik (OLS) bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantung secara parsial maupun secara bersama-sama, serta untuk mengetahui besaran dan arah dari pengaruh tersebut.

Hasil analisis dengan menggunakan analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa variabel perkembangan ekonomi daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap derajat desentralisasi fiskal. Variabel sumbangan dan bantuan bersifat *Block Grant* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap derajat desentralisasi fiskal, sedangkan variabel bagi hasil pajak pemerintah pusat juga berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap derajat desentralisasi fiskal.

Kata kunci : Derajat Desentralisasi Fiskal, *Block Grants*, Bagi Hasil Pajak Pemerintah Pusat, Perkembangan Ekonomi Daerah.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan adalah suatu *dynamic concept* yang merupakan suatu proses perubahan secara terus – menerus ke arah perbaikan, yakni suatu upaya peningkatan keseluruhan sistem sosial dan ekonomi menuju suatu kehidupan yang lebih baik dalam arti lebih berperikemanusiaan (Syahdullah, 1999: 56). Secara umum pembangunan mencakup empat aspek; pertama, pembangunan harus memberikan kapasitas (*capacity*), artinya apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan energi yang diperlukan untuk itu. Kedua, pembangunan harus menekan pada pemerataan (*equity*), artinya perhatian yang tidak merata pada berbagai kelompok masyarakat akan memecah belah dan menghancurkan kapasitas mereka. Ketiga, pemberian kuasa dan wewenang masyarakat harus lebih besar, dengan pengertian bahwa hasil pembangunan cukup bermanfaat bagi masyarakat apabila masyarakat memiliki wewenang yang sepadan. Keempat, pembangunan mengandung arti kelangsungan perkembangan (*sustainable*) dan interdependensi antara satu sektor dengan sektor yang lainnya (Juned, dkk., 1995 : 22).

Selanjutnya (Todaro, 1997: 8) mengatakan bahwa konsep tentang pembangunan harus diposisikan lebih dari pemenuhan kebutuhan materi di dalam kehidupan manusia, pembangunan merupakan proses multi dimensi yang meliputi perubahan organisasi dan orientasi dari seluruh sistem sosial dan ekonomi. Dengan demikian konsep pembangunan menunjukkan pada perubahan yang meningkat, baik pada bidang sosial maupun ekonomi.

Konsep pembangunan ekonomi diartikan sebagai perubahan yang meningkat pada kapasitas produksi nasional, peningkatan dimaksud dicerminkan pada pertumbuhan ekonomi. Indikator pertumbuhan ekonomi tidak dapat hanya di lihat secara materiel, seperti meningkatkan pendapatan per-kapita, tetapi juga peningkatan formasi kapital nonmateriel seperti kebijaksanaan sosial budaya yang menunjang harmoni sosial dan kestabilan politik serta kemandirian (Kunarjo, 1993: 6).

Dalam upaya merealisasikan konsep pembangunan ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat, maka peran pemerintah menjadi sentral karena sektor swasta tidak akan dapat mengatasi masalah perekonomian sepenuhnya, sehingga perekonomian tidak mungkin diserahkan sepenuhnya kepada sektor swasta. Di dalam perekonomian modern, peranan pemerintah dapat diklasifikasikan dalam tiga golongan, yaitu (Mangkoesobroto, 1998: 2-10):

1. Peranan alokasi, yaitu peranan pemerintah dalam alokasi sumber-sumber ekonomi, dalam hal ini pemerintah mengusahakan agar alokasi sumber-sumber ekonomi dilaksanakan secara efisien.
2. Peranan distribusi, peranan pemerintah dalam hal ini adalah distribusi pendapatan dan kekayaan.
3. Peranan stabilisasi perekonomian

Di dalam merealisasikan peranan tersebut, maka salah satu sisi penting yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah adanya perencanaan pembangunan secara integral, meliputi pusat dan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, Dror, Y., dalam (Kunarjo, 1993: 7) menyatakan bahwa perencanaan sebagai suatu proses penyiapan seperangkat

keputusan untuk di laksanakan pada waktu yang akan datang yang akan di arahkan pada pencapaian sasaran tertentu.

Perencanaan yang baik harus mempertimbangkan keadaan sekarang, kegagalan dan keberhasilan di waktu lampau, potensi yang ada, kemampuan merealisasikan potensi yang ada serta kendala (Kunarjo, 1993:17). Merencanakan sesuatu tanpa mengetahui sumber daya baik sumber daya alam, manusia serta sumber pembiayaan yang tersedia, adalah merupakan perencanaan yang ambisius dan hanya akan mengakibatkan berbagai kesulitan di kemudian hari.

Pembangunan ekonomi yang dilaksanakan tidak hanya dalam konteks pembangunan nasional, akan tetapi mencakup pembangunan ekonomi di daerah, yang merupakan bagian integral dari pembangunan ekonomi nasional. Hal ini menjadi semakin penting dengan adanya otonomi daerah yang pada prinsipnya untuk mempercepat terjadinya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dengan adanya semangat otonomi daerah, maka kabupaten dan kota dituntut untuk dapat merealisasikan pembangunan ekonomi daerah sesuai dengan keinginan masyarakat setempat berdasarkan atas inisiatif dan peran serta masyarakat.

Masalah pokok dalam pembangunan ekonomi daerah terletak pada penekanan kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (*endogenous development*) dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan, dan sumber daya fisik secara lokal (daerah). Orientasi ini mengarah pada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut untuk menciptakan kesempatan kerja yang dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi (Arsyad, 1999: 5). Sejalan dengan adanya hal tersebut maka diperlukan perencanaan untuk

memperbaiki penggunaan sumber daya yang tersedia di daerah tersebut dan untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan sumberdaya-sumberdaya secara bertanggung jawab.

Secara khusus bahwa di dalam hubungannya dengan perencanaan pembangunan termasuk di dalamnya perencanaan pembangunan daerah, maka faktor pembiayaan menjadi sangat penting, bahkan komponen pembiayaan termasuk di dalam perencanaan. Dalam kaitan ini, (Kunarjo, 1993: V) menyatakan bahwa perencanaan dan pembiayaan adalah dua kata yang tidak dapat dipisahkan. Perencanaan tanpa pembiayaan yang memadai hanya angan-angan kosong yang tidak banyak manfaatnya, sedangkan pembiayaan tanpa suatu perencanaan yang baik adalah merupakan suatu pemborosan. Dengan perencanaan yang baik, maka pengeluaran-pengeluaran akan dapat diarahkan ke sasaran yang lebih baik, sistematis, efisien dan efektif.

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah di Indonesia, pembiayaan pembangunan bagi kebanyakan daerah masih sangat mengandalkan sumber pembiayaan pembangunan yang berasal dari pemerintah pusat. Hal ini terlihat di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), bahwa sekitar dua pertiga dari total pengeluaran pemerintah daerah dibiayai oleh bantuan dan sumbangan pemerintah pusat (Shah, dkk., 1994). Berdasarkan hal tersebut tampak bahwa sumber-sumber PAD di kabupaten/ kota ternyata belum dapat mendukung terselenggaranya pembangunan daerah, karena sumber dana dari pemerintah pusat masih tetap lebih besar dari potensi yang dapat digali dari sektor PAD. Padahal kriteria penting dari adanya otonomi daerah adalah adanya kesepadanan antara dana dari pusat dan PAD, bahkan porsi PAD seharusnya jauh lebih besar daripada dana yang diterima dari pusat.

Di samping hal tersebut, (Koswara.,2000 : 98) berpendapat bahwa salah satu indikator yang menunjukkan suatu daerah mampu melaksanakan otonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah. Dalam hal ini daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber keuangannya sendiri, mengola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, diperlukan pemahaman tentang potensi penerimaan daerah, yaitu kekuatan yang ada di daerah untuk menghasilkan sejumlah penerimaan tertentu. Di satu sisi, sebagaimana dikemukakan oleh Mardiasmo dan Makhfatih (2000: 16) adalah dengan melihat struktur ekonomi dan sosial suatu daerah, yang dapat menentukan tinggi rendahnya tuntutan akan adanya pelayanan publik dalam kuantitas dan kualitas tertentu. Pada masyarakat industri tuntutan akan kuantitas dan kualitas pelayanan publik akan lebih tinggi daripada masyarakat yang berbasis pertanian. Pada masyarakat berbasis industri, pemerintah akan terpacu untuk menarik pungutan-pungutan guna memenuhi tuntutan ketersediaan fasilitas pelayanan publik tersebut. Di samping hal tersebut struktur ekonomi dan sosial suatu daerah juga menentukan kemampuan masyarakat untuk membayar segala pungutan yang telah ditetapkan pemerintah.

Realitas yang terjadi selama ini dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah rendahnya proposi PAD terhadap APBD, sehingga daerah sangat bergantung kepada sumber dana dari pemerintah pusat. Dalam kaitannya dengan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dapat diketahui bahwa derajat sentralisasi fiskal di Indonesia sangat tinggi di bandingkan dengan negara lain. Pemerintah daerah dalam

kenyataannya sangat tergantung pada sumber dana dari pemerintah pusat, baik untuk pengeluaran rutin maupun untuk pengeluaran pembangunan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa derajat desentralisasi fiskal di Indonesia relatif rendah, karena masih dominannya alokasi dana dari pemerintah pusat kepada daerah.

Secara khusus Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) di Kabupaten Gresik yang terlihat dari kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah tahun 2003 sampai dengan tahun 2008 kecil, bahkan tidak terjadi peningkatan yang berarti. Pada tahun 2003-2008 kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah terbesar pada tahun 2008 yaitu sebesar 18,52, tetapi kenaikan dari kontribusi tersebut masih sangat kecil, bahkan pada tahun sebelumnya mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2004 dan pada tahun 2006. Hal ini menunjukkan bahwa kriteria penting dari adanya otonomi daerah yang menunjuk pada kesepadanan antara sumber dana dari pusat dan PAD, bahkan porsi PAD seharusnya jauh lebih besar dari sumber dana dari pusat dengan terus mengalami peningkatan ternyata masih belum bisa terealisasi. Berarti tingkat ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat masih tinggi.

Tingginya kontribusi dana perimbangan dari pemerintah pusat terhadap total pendapatan daerah kabupaten Gresik yang ditunjukkan pada tahun 2003 sampai dengan 2008. Kontribusi tersebut mencapai lebih dari 50% atau separuhnya, dalam tabel dapat dilihat meski kontribusi dana perimbangan pemerintah pusat terhadap total pendapatan daerah di Kabupaten Gresik mulai tahun 2004 terjadi penurunan yang cukup berarti hingga tahun 2008, yaitu sebesar kontribusi dana perimbangan terhadap total pendapatan secara berturut-turut mulai tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 adalah 84,28%, 78,50%, 74,41%, 72,95%, 69,42%, namun angka sebesar itu masih cukup

tinggi. Hal ini menunjukkan tingkat sentralisasi fiskal Kabupaten Gresik masih tinggi. Terkait dengan hal tersebut diperlukan upaya meningkatkan penerimaan PAD dengan tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi daripada tingkat pertumbuhan APBD, sehingga proporsi PAD terhadap total penerimaan APBD menjadi meningkat.

Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahannya adalah bahwa Derajat Desentralisasi Fiskal di Kabupaten Gresik, yang tercermin dari kontribusi PAD terhadap total APBD masih rendah. Kenyataan ini menyebabkan pendanaan bagi kepentingan pembangunan daerah masih sangat tergantung dari dana yang berasal dari pemerintah pusat. Terkait dengan hal tersebut, untuk meningkatkan Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Gresik perlu dilihat faktor-faktor yang mempengaruhi, utamanya faktor non PAD yang meliputi : Perkembangan ekonomi daerah, bagi hasil pajak pemerintah pusat, serta sumbangan dan bantuan yang dalam penelitian ini di khususkan pada sumbangan dan bantuan yang bersifat umum (*Block Grants*) atau Dana Alokasi Umum (DAU).

1.2. Perumusan Masalah

Sebelum penulis mengemukakan permasalahan yang ada, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan arti dari kata masalah itu sendiri, menurut Kartini Kartono (1996: 18) :

“Masalah adalah situasi yang punya karakteristik sifat-sifat yang belum diketahui untuk di pecahkan atau di ketahui secara pasti.”

Dari definisi masalah tersebut dan berdasarkan uraian di atas, maka perumusan masalah yang akan dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Apakah variabel perkembangan ekonomi daerah, Sumbangan dan Bantuan yang bersifat *Block Grants*, serta Bagi Hasil Pajak Pemerintah Pusat di Kabupaten Gresik masing-masing berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap Derajat Desentralisasi Fiskal di Kabupaten Gresik?
2. Apakah variabel perkembangan ekonomi daerah, Sumbangan dan Bantuan yang bersifat *Block Grants*, serta Bagi Hasil Pajak Pemerintah Pusat di Kabupaten Gresik masing-masing berpengaruh secara bersama-sama dan signifikan terhadap Derajat Desentralisasi Fiskal di Kabupaten Gresik?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh secara parsial variabel-variabel perkembangan ekonomi daerah, Sumbangan dan Bantuan yang bersifat *Block Grants*, serta Bagi Hasil Pajak Pemerintah Pusat terhadap Derajat Desentralisasi Fiskal di Kabupaten Gresik.
2. Untuk menganalisis pengaruh bersama variabel-variabel perkembangan ekonomi daerah, Sumbangan dan Bantuan yang bersifat *Block Grants*, serta Bagi Hasil Pajak Pemerintah Pusat terhadap Derajat Desentralisasi Fiskal di Kabupaten Gresik.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu ekonomi perencanaan dan pembangunan yaitu tentang mekanisme kebijakan desentralisasi beserta seluruh teori yang mendasarinya serta variabel-variabel yang terdapat di dalamnya.
2. Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Gresik, khususnya dalam upaya peningkatan Derajat Desentralisasi Fiskal, dengan melihat perkembangan ekonomi daerah, Bagi Hasil Pajak Pemerintah Pusat, serta Sumbangan dan Bantuan, utamanya yang bersifat *Block Grants*.
3. Sebagai bahan perbandingan dan informasi bagi pihak lain untuk mengadakan penelitian lebih lanjut.

